

Eufemisme sebagai Instrumen Ideologis dalam Wacana Kebijakan Makan Bergizi Gratis

(*Euphemism as an Ideological Instrument in the Discourse of the Makan Bergizi Gratis Policy*)

¹Ulfa Kurniasih*, ²Azizatul Khairi

¹Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

²Universitas Bengkulu, Indonesia

E-mail: ¹ulfa.kurniasih@uingusdur.ac.id; ²akhairi@unib.ac.id

*Correspondent email author: ulfa.kurniasih@uingusdur.ac.id

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History

Received 17 April 2026

Revised 5 May 2026

Accepted 16 July 2026

Keywords

Critical Discourse Analysis;

Eco-theology;

Food Justice;

MBG Program;

Policy Euphemism.

Makan Bergizi Gratis (MBG) program, launched on January 6, 2025 with a Rp71 trillion allocation, represents Indonesia's largest national nutrition intervention. On March 31, 2026, the government announced a reduction in distribution frequency from six to five days per week, consistently communicated using the phrase "penyesuaian anggaran" (budget adjustment) and related euphemisms. This study aims to analyze the linguistic functions of this euphemistic framing, identify the underlying ideological mechanisms, and examine its ecotechnological implications for food justice. Using Fairclough's (1992, 1995) three-dimensional Critical Discourse Analysis (CDA)—text, discursive practice, and social practice—alongside eco-theological justice as an evaluative analytical lens, this study applies data source triangulation across four categories: formal policy documents, official statements, independent research reports, also national and international media coverage. Analysis identifies seven systematic euphemistic strategies in MBG policy texts, including lexical substitution, nominalization, naturalization, externalization of responsibility, and absent presence of beneficiaries. These strategies reproduce four dominant ideologies: fiscalism, centralism without deliberation, populism without evidence-based evaluation, and asymmetric burden distribution. From an eco-theological perspective, the analysis finds that the policy raises concerns regarding food justice principles, generates 1.1–1.4 million tons of food waste annually, and reflects a deficit in transparent state stewardship. This study contributes a novel integration of CDA and eco-theological justice frameworks for analyzing food policy discourse in Indonesia.

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Riwayat Artikel

Masuk 17 April 2026

Direvisi 5 Mei 2026

Diterima 16 Juli 2026

Kata Kunci

Analisis Wacana Kritis;

Ekoteologi;

Eufemisme Kebijakan;

Keadilan Pangan;

Program MBG.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 dengan alokasi Rp71 triliun, merupakan intervensi gizi nasional terbesar di Indonesia. Pada 31 Maret 2026, pemerintah mengumumkan pengurangan frekuensi distribusi dari enam menjadi lima hari per minggu, yang secara konsisten dikomunikasikan menggunakan frasa "penyesuaian anggaran" dan eufemisme terkait. Studi ini bertujuan menganalisis fungsi linguistik dari kerangka eufemistik, mengidentifikasi mekanisme ideologis yang mendasarinya, dan memeriksa implikasi ekoteologisnya terhadap keadilan pangan. Dengan menggunakan Analisis Wacana Kritis (CDA) tiga dimensi Fairclough (1992, 1995)—teks, praktik diskursif, dan praktik sosial—bersama dengan keadilan ekoteologis sebagai lensa analitis evaluatif, studi ini menerapkan triangulasi sumber data di empat kategori: dokumen kebijakan formal, pernyataan resmi, laporan penelitian independen, serta liputan media nasional dan internasional. Analisis mengidentifikasi tujuh strategi eufemistik sistematis dalam teks kebijakan MBG, termasuk substitusi leksikal, nominalisasi, naturalisasi, eksternalisasi tanggung jawab, dan ketidakhadiran penerima manfaat. Strategi-strategi ini mereproduksi empat ideologi dominan: fiskalisme, sentralisme tanpa deliberasi, populisme tanpa evaluasi berbasis bukti, dan distribusi beban yang asimetris. Dari perspektif ekoteologis, analisis menemukan bahwa kebijakan tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait prinsip-prinsip keadilan pangan, menghasilkan 1,1–1,4 juta ton limbah pangan setiap tahunnya, dan mencerminkan defisit dalam tata kelola negara yang transparan. Studi ini memberikan integrasi baru antara kerangka kerja CDA dan keadilan ekoteologis untuk menganalisis wacana kebijakan pangan di Indonesia.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Indonesia mencatat prevalensi *stunting* 21,6% dan *wasting* 7,1% pada tahun 2023. Angka ini menempatkan Indonesia di antara yang terberat beban gizinya di Asia Tenggara (Purwaningsih, 2023; Wulandari & Kumalasari, 2024). Persoalan ini menjadi salah satu justifikasi utama lahirnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan sebagai janji kampanye pasangan Prabowo–Gibran dan resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 dengan alokasi Rp71 triliun dalam APBN 2025. Program ini menargetkan peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui—dengan ambisi menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025 (B G Nasional, 2025).

Pada 31 Maret 2026, pemerintah mengumumkan pengurangan distribusi MBG dari enam menjadi lima hari per pekan. Kebijakan ini dikomunikasikan secara konsisten melalui kata dan frasa *penyesuaian skema*, *efisiensi*, dan *transformasi struktural* (Medcom.id, 31 Maret 2026). Sementara itu, media internasional menggunakan diksi yang berbeda secara substantif. *South China Morning Post* menyebutnya “*slashes free meals budget*”, *The Straits Times* menggunakan “*cut in free meal programme*”, dan AFP merumuskannya sebagai “*trims meals programme*” (Kompas, 2026).

Kesenjangan diksi antara teks resmi pemerintah dan teks media internasional ini mencerminkan fenomena yang secara analitis disebut eufemisme institusional—penggunaan bahasa yang diperhalus secara strategis dalam komunikasi kebijakan publik (Fairclough, 1992; Lutz, 1989). Kajian tentang MBG yang sudah ada berfokus pada dimensi gizi (Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), 2024), keamanan pangan (The Conversation Indonesia, 2026), dan analisis anggaran (Center of Economic and Law Studies (Celios, 2025). Belum ada penelitian yang menganalisis dimensi linguistik-ideologis wacana kebijakan MBG secara sistematis, khususnya dengan memadukan Analisis Wacana Kritis (AWK) dan ekoteologi sebagai kerangka evaluatif. Celah inilah yang menjadi kebaruan sekaligus yang akan dijawab dalam penelitian ini.

Ada tiga pertanyaan yang mendasari penelitian, yaitu (1) Bagaimana frasa “penyesuaian anggaran” dan eufemisme turunannya bekerja secara linguistik dalam teks-teks kebijakan MBG?; (2) Ideologi apa yang direproduksi melalui strategi diskursif tersebut?; dan (3) Apa implikasi ekoteologisnya terhadap keadilan pangan dan tanggung jawab moral negara?. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada dua hal: (1) aplikasi pertama AWK Fairclough pada wacana kebijakan pangan di Indonesia; dan (2) penggabungan AWK dengan ekoteologi keadilan sebagai kerangka evaluatif analitis—sebuah integrasi yang belum pernah dilakukan dalam literatur yang ada.

Kerangka teoretis yang digunakan adalah AWK tiga dimensi (Fairclough, 1992; Heinze, 2024). Model ini menganalisis setiap peristiwa diskursif secara simultan sebagai teks (level mikro: pilihan kosakata, tata bahasa, modalitas, kohesi), praktik diskursif (level meso: produksi, distribusi, dan konsumsi teks; intertekstualitas dan interdiskursivitas), dan praktik sosial (level makro: ideologi, hegemoni, relasi kuasa, dampak sosial). Fairclough (1992) menegaskan bahwa “*language is a form of social practice*” yang dimaknai bahasa bukan sekadar sistem tanda, melainkan arena di mana kekuasaan dikonstruksi dan direproduksi.

Nominalisasi, misalnya, bukan hanya pilihan gramatikal. Ia menghapus agen dari kalimat dan dengan demikian menghapus akuntabilitas. Adapun *absent presence*, atau ketidakhadiran yang bermakna dari elemen tertentu dalam teks, adalah indikator ideologi yang tidak kalah kuat dari apa yang hadir secara eksplisit (Fairclough, 2005).

Ekoteologi keadilan diposisikan dalam penelitian ini sebagai kerangka evaluatif analitis (*analytical evaluative framework*), bukan sekadar perspektif moral. Ia menyediakan empat kriteria yang dapat dioperasionalkan untuk menganalisis kebijakan pangan publik, yaitu kecukupan (apakah distribusi sumber daya cukup menjangkau semua pihak?), partisipasi (apakah pihak terdampak dilibatkan dalam pengambilan keputusan?), solidaritas (apakah yang paling rentan diprioritaskan?), dan keberlanjutan ekologis (apakah kebijakan bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan?). Dengan keempat kriteria ini, analisis ekoteologis bergerak dari evaluasi normatif menuju verifikasi empiris yang dapat diperdebatkan secara akademis.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam paradigma kritis (*critical paradigm*). Paradigma kritis dipilih karena tujuan penelitian melampaui deskripsi, yakni berupaya mengungkap mekanisme ideologis dalam wacana kebijakan dan berkontribusi pada akuntabilitas publik (Fairclough & Fairclough, 2018). Sumber data penelitian ini adalah korpus teks yang berkaitan dengan kebijakan MBG selama periode Januari 2025–Maret 2026. Objek data penelitiannya adalah dimensi eufemistik dan ideologis dari teks-teks tersebut. Unit analisisnya berupa segmen teks—kalimat, frasa, atau pernyataan—yang mengandung frasa “penyesuaian anggaran” atau derivatnya, serta teks-teks pembanding yang merepresentasikan posisi aktor lain.

Tabel 1. Kategori dan Sumber Data Penelitian

No.	Kategori Sumber	Jumlah	Data
1	Kebijakan Formal	5 dokumen	Inpres No. 1/2025; Perpres No. 83/2024; Surat Menkeu S-37/MK.02/2025; UU No. 62/2024; Juknis BGN
2	Pernyataan Pejabat Publik	8 pernyataan	Konpres Airlangga 31/3/2026; Siaran pers Kemendikdasmen 20/2/2026; Pernyataan Kepala BGN Dadan Hindayana; Wakil Kepala BGN Nanik Deyang
3	Laporan Riset Independen	7 laporan	CISDI (2024); Celios (2025); Bappenas (2025); (2025); TII (2025); The PRAKARSA (2025); Riset UPI (2025)
4	Pemberitaan Media	12 artikel	South China Morning Post; The Straits Times; AFP; Kompas.com; Tempo.co; The Conversation Indonesia; VOI; Badan Gizi Nasional; DetikNews Channel News Asia; CNN World; ANTARA News.

Sumber: Dokumentasi peneliti, 2026.

Seleksi data dilakukan menggunakan dua kriteria, yaitu (1) relevansi tematik—teks harus berkaitan langsung dengan kebijakan MBG dan frasa “penyesuaian anggaran” dan (2) representasi aktor—data harus mencakup spektrum aktor yang berbeda untuk memungkinkan

verifikasi silang. Berdasarkan kriteria ini, data dikumpulkan dari empat kategori sumber yang ditriangulasi. Triangulasi sumber data (*data source triangulation*) dipilih karena eufemisme beroperasi secara berbeda tergantung pada posisi institusional aktor yang memproduksinya (Creswell, 2015). Pemeriksaan silang antara teks pemerintah, riset independen, dan media internasional memungkinkan identifikasi kontradiksi antarsumber yang dalam kerangka Fairclough (1992) justru merupakan data analitis yang paling signifikan. Tabel 1 berikut menyajikan kategori dan sumber data penelitian.

Analisis dilakukan dalam tiga tahap sesuai model Fairclough. Tahap pertama, deskripsi teks: identifikasi dan klasifikasi fitur linguistik—kosakata, nominalisasi, modalitas, kohesi, dan *absent presence*—pada setiap segmen data. Tahap kedua, interpretasi praktik diskursif: analisis konteks produksi dan distribusi teks, termasuk intertekstualitas (referensi ke teks lain) dan interdiskursivitas (konvensi wacana yang dipinjam) (Sitorismi, 2025). Tahap ketiga, eksplanasi praktik sosial: identifikasi ideologi dan relasi hegemoni yang direproduksi oleh wacana. Pada tahap ketiga ini, kriteria ekoteologis digunakan sebagai alat evaluasi analitis. Semua istilah teknis ditulis konsisten dalam bahasa Indonesia, dan padanan Inggris dicantumkan dalam kurung pada kemunculan pertama. Validitas dicapai melalui triangulasi sumber, perbandingan temuan dengan laporan independen (CISDI, CELIOS, The Conversation Indonesia), dan transparansi dokumentasi proses analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis kosakata dan gramatikal terhadap 32 segmen teks yang dipilih dari keempat kategori sumber, yang masuk ke dalam dimensi teks, mengidentifikasi tujuh strategi eufemistik yang terdokumentasi. Tabel 2 berikut menyajikan matriks strategi-strategi terkait contoh konkret dari korpus dan fungsi analitisnya dalam kerangka Fairclough.

Tabel 2. Matriks Strategi Eufemistik dalam Wacana Kebijakan MBG

No.	Strategi Eufemistik	Contoh dalam Korpus Data	Fungsi dalam Kerangka AWK Fairclough
1	Substitusi leksikal	“Penyesuaian skema” (Airlangga, Medcom.id, 31/3/2026) menggantikan kata “pemangkasan” atau “pengurangan”	Menyembunyikan arah perubahan; kata derivat “sesuai” tidak mengindikasikan naik atau turun (<i>representational choice</i>) (Fairclough, 1992).
2	Nominalisasi	“Distribusi makanan dibagikan lima kali dalam lima hari” (Nanik Deyang, Kompas.com, 31/3/2026)	Menghapus agen dan akuntabilitas dari kalimat; tindakan diubah menjadi entitas teknis yang seolah bergerak sendiri (<i>hidden agency</i>) (Fairclough, 1992).
3	Kluster positif kata	“Transformasi struktural”, “produktif”, “berdaya tahan”, “menguatkan fiskal” (Airlangga, 31/3/2026)	Merepresentasikan pengurangan sebagai kemajuan; menempatkan pemerintah pada posisi positif (<i>ideological square</i>) (Fairclough, 1992).

No.	Strategi Eufemistik	Contoh dalam Korpus Data	Fungsi dalam Kerangka AWK Fairclough
4	Naturalisasi klaim	<i>“Tanpa mengurangi substansi manfaat bagi penerima”</i> (Menkeu Purbaya, Infobalinews, 30/3/2026)	Memperlakukan klaim ideologis sebagai akal sehat yang tidak perlu dibuktikan; modalitas “mencerminkan upaya” mengakui ketidakpastian secara diam-diam (<i>naturalization</i>) (Fairclough, 1992).
5	Eksternalisasi tanggung jawab	Kebijakan diambil <i>“untuk meredam dampak perang di Timur Tengah”</i> (Nanik Deyang, Kompas.com, 2026)	Memindahkan tanggung jawab keputusan politik ke faktor eksternal yang tampak di luar kendali; mengurangi tuntutan akuntabilitas publik.
6	<i>Absent presence</i>	Tidak ada satu pernyataan pejabat pun yang menyebut anak-anak atau ibu hamil sebagai subjek yang kepentingannya dipertimbangkan	Mengabsenkan penerima manfaat dari narasi kebijakan; hierarki nilai ditunjukkan oleh siapa yang hadir dan absen (Fairclough, 1992).
7	Penyembunyian kontradiksi	Janji <i>“MBG tidak akan dipangkas”</i> vs. pemangkasan aktual; kontradiksi ini absen dari seluruh teks resmi	Menghapus inkonsistensi temporal untuk mempertahankan koherensi narasi; diidentifikasi sebagai <i>contradictions within discourse</i> (Fairclough, 1992).

Tabel 3 menyajikan kontradiksi diksi antara pernyataan resmi pemerintah, *framing* media internasional, dan realitas faktual yang terdokumentasi dari sumber-sumber riset independen. Kontradiksi antarsumber ini merupakan indikator empiris dari *contradictions within discourse* (Fairclough, 1992).

Tabel 3. Perbandingan Diksi Resmi vs. Media Internasional vs. Realitas Faktual

No.	Diksi Resmi Pemerintah Indonesia	Diksi Media Internasional	Realitas Faktual yang Terdokumentasi
1	<i>“Pemerintah Putuskan MBG Jadi 5 Hari Imbas Efisiensi, Negara Hemat Rp 20 T”</i> (D. News, 2026)	<i>“Indonesia will trim its free meals programme in primary and secondary schools from six to five days a week”</i> (Asia, 2026)	Frekuensi distribusi berkurang dari 6→5 hari/pekan. Kebijakan ini menimbulkan risiko sosial tinggi jika diterapkan seragam tanpa mempertimbangkan wilayah dengan kerentanan gizi tinggi—kebijakan ini menekan belanja fiskal, tetapi bukan solusi fundamental. Penghematan sesungguhnya bervariasi, seperti BGN menyebut Rp20 T, Menkeu Purbaya menyebut estimasi kasar Rp40 T.
2	<i>“Purbaya sebut efisiensi MBG bisa hemat Rp40 triliun per tahun”</i> (Menkeu Purbaya, Antaranews, (Antara News, 2026)	<i>“Indonesia slashes free meals budget to save US\$2.3 billion”</i> (Post, 2026)	Angka Rp40 triliun diakui sendiri oleh Menkeu Purbaya sebagai <i>“hitungan pertama kasar”</i> yang belum diverifikasi. Total anggaran MBG 2026 mencapai Rp335 triliun—naik lebih dari lima kali lipat dibanding realisasi 2025 sebesar Rp51,5 triliun. Penghematan berasal dari pengurangan frekuensi distribusi, bukan reformasi struktural rantai pasok.

No.	Diksi Resmi Pemerintah Indonesia	Diksi Media Internasional	Realitas Faktual yang Terdokumentasi
3	<i>“Transformasi struktural menuju ekonomi yang efisien” (Airlangga Hartarto, Medcom.id, 31 Maret 2026)</i>	<i>“Indonesia trims meals programme: what next?” (France-Presse, 2026)</i>	Efisiensi dipicu oleh tekanan fiskal eksternal, yakni konflik Iran–Israel–AS yang memicu ketidakstabilan harga energi global, bukan agenda reformasi sistemik yang terencana. Pada September 2025, hanya Rp13 triliun ($\approx 18,3\%$ dari anggaran Rp71 triliun) yang telah tersalurkan, mencerminkan <i>bottleneck</i> logistik dan administratif yang parah.
4	<i>“Menjaga efektivitas program tanpa mengurangi substansi manfaat bagi penerima” (Menkeu Purbaya) (Faturahman, 2026)</i>	<i>“Indonesia eyes savings of \$3 billion from cut in free meal programme” (Times, 2026)</i>	Klaim \$3 miliar tidak didukung metodologi transparan. Standar keamanan pangan baru diwajibkan (sertifikat SLHS) per September 2025–sembilan bulan setelah ribuan korban keracunan berjatuh–menunjukkan inkonsistensi antara klaim <i>“efektivitas terjaga”</i> dan kondisi lapangan.
5	<i>“BGN pantau status gizi penerima program MBG setiap enam bulan” (Badan Gizi Nasional, 2025a)</i>	<i>“Hundreds hit by food poisoning in Indonesia after eating free school meals” (CNN World, 2025)</i>	Berdasarkan data BGN dan Kemenkes, tercatat 13.371 penerima manfaat mengalami gangguan kesehatan akibat dugaan keracunan pangan dengan 636 orang harus menjalani rawat inap. MBG menjadi penyumbang terbesar kasus keracunan pangan di Indonesia–sekitar 48% dari seluruh 441 kejadian keracunan pangan nasional sepanjang 2025. Penyebab utamanya adalah kontaminasi bakteri <i>E. coli</i> akibat proses pengolahan dan penyimpanan yang tidak higienis.
6	<i>“Kreatif! Limbah MBG Disulap Jadi Inovasi Ekonomi Hijau” (Badan Gizi Nasional, 2025b)</i>	<i>“MBG Program Garbage Reaches 3,500 Tons Per Day, Minister Hanif Reminds Danger of Pollution” (Voi, 2025)</i>	The Conversation klaim <i>food waste</i> Rp1,1–1,4 juta ton/tahun. Sejalan dengan data SIPSN KLHK 2024 yang mencatat sisa makanan menyumbang 39,36% dari 35,02 juta ton sampah nasional, dan program distribusi massal MBG berpotensi menjadi <i>“generator tambahan”</i> sampah pangan jika pengelolaan sisa tidak diperbaiki.

Sumber: Diolah dari Medcom.id (2026), Infobalinews (2026), South China Morning Post (2026), The Straits Times (2026), AFP (2026), Bappenas (2025), CELIOS (2025).

Tabel 3 memperlihatkan secara visual bahwa setiap klaim resmi pejabat Indonesia memiliki padanannya dalam teks media internasional yang jauh lebih denotatif, dan keduanya dapat dikontraskan dengan realitas empiris yang terdokumentasi. Kontras ini adalah inti dari apa yang dianalisis dalam tiga strategi pertama berikut.

Pembahasan

Bagian ini memaparkan uraian analisis terhadap satuan bahasa yang telah terkumpulkan sebagai data pada dimensi teks.

Substitusi Leksikal: Menyembunyikan Arah Perubahan

Hasil seluruh teks resmi pemerintah menggunakan derivat kata “sesuai” untuk

mendeskripsikan kebijakan pengurangan distribusi. Dalam analisis representasi kosakata Fairclough (1992), setiap pilihan leksikal merupakan “*representational choice*” yang mengindikasikan perspektif aktor. Kata “penyesuaian” tidak mengindikasikan arah perubahan—naik atau turun—sehingga menyembunyikan informasi krusial. Datum berikut mengilustrasikannya.

“Potensi penghematan dari kegiatan ini mencapai Rp 20 triliun. [Kebijakan ini merupakan] bagian dari transformasi struktural yang disiapkan pemerintah untuk menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berdaya tahan” (A. News, 2026).

Sebaliknya, *South China Morning Post* (Maret 2026) menggunakan kata “*slashes*” –verba yang secara semantis mengindikasikan pengurangan tajam dan cepat. *Times* (2026) menggunakan “*cut*” dan secara eksplisit mencatat bahwa pemerintah sebelumnya telah menegaskan MBG tidak akan dipangkas. Kontradiksi ini terdokumentasi oleh sumber eksternal, sementara absen dari seluruh teks resmi.

Nominalisasi dan Penghapusan Agen

Pada level gramatikal, nominalisasi mengubah tindakan “*pemerintah mengurangi jatah makan*” menjadi entitas teknis “distribusi”. Fairclough (1992) menyebut strategi ini “*hides agency*” –agen dan akuntabilitas terhapus dari kalimat. Datum berupa pernyataan Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang mengilustrasikannya.

“Distribusi makanan segar dalam Program MBG akan dibagikan lima kali dalam lima hari untuk anak sekolah.”

Frasa “lima kali dalam lima hari” berfungsi sebagai data teknis yang terdengar netral. Tidak ada agen yang mereduksi; tidak ada penerima yang kehilangan. Anak-anak ditempatkan sebagai objek pasif distribusi (“untuk anak sekolah”), bukan sebagai subjek yang kepentingannya dipertimbangkan—*sebuah absent presence* yang konsisten di seluruh teks resmi.

Naturalisasi Klaim

Ketika klaim ideologis dipresentasikan seolah sebagai akal sehat yang tidak perlu dibuktikan, maka dapat dikategorikan sebagai strategi naturalisasi (*naturalization*) (Fairclough, 1992). Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang bersumber dari *Antara News* (2026) mengandung naturalisasi yang paling jelas.

“Efisiensi pelaksanaan MBG berpotensi menghemat anggaran hingga Rp40 triliun per tahun. [...] Langkah ini mencerminkan upaya menjaga efektivitas program tanpa mengurangi substansi manfaatnya bagi penerima.”

Klaim “*tanpa mengurangi substansi manfaat*” adalah pernyataan yang secara logis tidak dapat dipertahankan. Jika frekuensi distribusi berkurang dari 6 menjadi 5 hari, secara matematis penerima akan menerima lebih sedikit makanan. Namun, klaim ini disampaikan

sebagai fakta yang tidak perlu dibuktikan. Modalitas “*mencerminkan upaya*” (bukan “menjamin” atau “terbukti”) secara diam-diam mengakui ini adalah klaim, bukan garansi—sebuah kekaburan yang fungsional bagi kepentingan pemerintah.

Eksternalisasi Tanggung Jawab dan *Absent Presence*

Dua strategi berikutnya berkaitan dengan bagaimana tanggung jawab didistribusikan (atau dihindarkan) dalam teks. Eksternalisasi tanggung jawab terlihat jelas dalam pernyataan Wakil Kepala BGN: kebijakan diambil “*untuk meredam dampak ekonomi dari perang di Timur Tengah yang mendorong harga minyak global naik tajam*” (Kompas, 2026). *Framing* ini menempatkan konflik geopolitik sebagai penyebab, seolah pemerintah tidak punya pilihan lain. Padahal, sebagaimana dicatat AFP (Maret 2026), ada pilihan-pilihan alternatif yang tersedia tetapi tidak dipertimbangkan secara terbuka.

Sementara itu, *absent presence* menurut Ives & Rana (2018)—ketidakhadiran yang bermakna—terdeteksi dalam seluruh korpus teks resmi. Tidak satu pun pernyataan pejabat menyebut anak-anak sekolah, ibu hamil, atau balita sebagai subjek yang kepentingannya dipertimbangkan secara eksplisit. Subjek yang aktif dalam teks-teks resmi adalah “*efisiensi*”, “*fiskal*”, “*transformasi*”, bukan “anak-anak”. Ini bukan kealpaan teknis, melainkan pilihan representasional yang mengungkap hierarki nilai. Kesehatan APBN diprioritaskan, sementara kebutuhan penerima manfaat disingkirkan dari narasi.

Praktik Diskursif: Produksi, Distribusi, dan Konsumsi Wacana

Sentralisasi Produksi Wacana

Analisis praktik diskursif menemukan bahwa wacana “*penyesuaian anggaran*” diproduksi melalui rantai yang sangat terpusat: Sidang Kabinet→Kantor Menko Perekonomian/BGN→Kantor Berita Antara→Media Nasional. Dalam rantai ini, tidak ada mekanisme formal yang memungkinkan suara penerima manfaat, ahli gizi independen, atau lembaga pengawas masuk ke dalam produksi teks resmi. T. I. Indonesia (2025) mengkritisi pola yang sama dalam kebijakan efisiensi sebelumnya, yakni “*DPR tidak menjalankan fungsinya untuk memastikan persetujuan rakyat saat pemerintah memotong anggaran*”. Konsekuensinya adalah homogenisasi *framing*. Hampir seluruh media nasional menggunakan diksi yang identik dengan diksi pejabat berupa “*penyesuaian*”, “*efisiensi*”, “*optimalisasi*”. Sementara itu, media internasional yang tidak terikat relasi kuasa yang sama menggunakan kata yang lebih denotatif. Ini adalah manifestasi dari hegemoni *discourse* (Fairclough, 1992)—satu cara membicarakan realitas mendominasi hingga tampak sebagai satu-satunya cara.

Intertekstualitas dan Interdiskursivitas

Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang “Efisiensi Belanja” berfungsi sebagai teks dasar (*master text*) yang melegitimasi semua pernyataan berikutnya. Dengan menamai kebijakan sebagai “efisiensi” bukan “pemangkasan” sejak level Inpres, semua tindak diskursif selanjutnya sudah terbingkai sebelum diucapkan. Ini adalah contoh dari apa yang Fairclough (1992) sebut sebagai “*order of discourse*”, yakni tatanan yang mendefinisikan batas-batas apa yang dapat dikatakan secara sah dalam suatu domain.

Interdiskursivitas tampak dalam kolonialisasi wacana pangan oleh wacana keuangan publik. Frasa “*penguatan fiskal*”, “*disiplin anggaran*”, dan “*transformasi struktural*”—yang lazim dalam dokumen kebijakan ekonomi—diinjeksikan ke dalam teks yang secara nominatif membicarakan gizi anak. Fairclough & Fairclough (2018) menyebut ini “*discourse colonization*”, yakni ketika satu wacana (ekonomi) mengambil alih dan mendefinisikan ulang wacana lain (kesehatan publik), dengan konsekuensi bahwa logika ekonomi menjadi satu-satunya logika yang dianggap sah.

Resistensi Diskursif

Wacana hegemonis ini tidak sepenuhnya tertutup. Koalisi masyarakat sipil mendaftarkan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atas UU APBN 2026 terkait anggaran MBG dengan argumen bahwa “dasar hukum pengaturan anggarannya tidak jelas”. Ini adalah penggunaan wacana hukum untuk mengontestasi wacana “efisiensi”, sebuah *discursive resistance* dalam terminologi Fairclough. Demikian pula, peneliti dari The Conversation Indonesia (2026), laporan Celios (2025), dan The Indonesian Institute (2025) menggunakan wacana akademis-evaluatif untuk memperlihatkan gap antara klaim dan realitas sehingga menciptakan ruang kontestasi yang melemahkan hegemoni wacana resmi.

Praktik Sosial: Ideologi dan Reproduksi Ketidaksetaraan

Fiskalisme sebagai Ideologi Dominan

Seluruh teks resmi menempatkan “kesehatan APBN” sebagai nilai yang tidak dapat ditolak dan yang menjustifikasi pengurangan layanan sosial. Namun, paradoks mencolok teridentifikasi. Anggaran MBG untuk APBN 2026 melonjak hampir 300%, dari Rp71 triliun (2025) menjadi Rp268 triliun, sementara anggaran Kemenkes dipotong dari Rp105,6 triliun menjadi Rp19,6 triliun (T. I. Indonesia, 2025). Pada saat yang sama, laporan Project M mengungkap alokasi dalam LPPP BGN 2025 yang sulit direkonsiliasi dengan retorika efisiensi, seperti sepeda motor listrik Rp1,2 triliun, tablet Rp508,4 miliar, seragam Rp 622,3 miliar.

Data ini menunjukkan bahwa “efisiensi” yang dikomunikasikan kepada publik sesungguhnya adalah realokasi politik yang didekorasi bahasa teknis bukan penghematan sistemik. Prof. Wahyudi Kumorotomo (UGM) menyebutnya “*bias politik yang mengutamakan agenda sektoral di atas sektor publik strategis seperti pendidikan dan kesehatan*” (T. I. Indonesia, 2025). Ini persis apa yang (Fairclough, 1992) sebut sebagai *ideological mystification*—penggunaan bahasa teknis untuk menyamarkan pilihan politik yang sangat konkret.

Populisme dan Defisit Evaluasi Berbasis Bukti

Presiden Prabowo menyebut MBG “investasi untuk masa depan bangsa” (Sekretariat Presiden RI, Oktober 2025). Namun, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives sudah memperingatkan sebelum program dimulai bahwa MBG “bukan solusi praktis untuk penyelesaian masalah stunting” karena hanya menyentuh 30% determinan *stunting*—intervensi gizi spesifik. Sementara itu, 70% determinan lainnya, yakni kemiskinan, sanitasi buruk, dan akses layanan kesehatan, tidak terjangkau oleh program ini. The Indonesian Institute (2025) mengkritisi program ini sebagai “program populis yang memberikan manfaat jangka pendek

namun mengabaikan aspek substantif”. Ketidaksesuaian antara klaim dan bukti ini diperparah oleh data capaian. Per Juli 2025, penerima manfaat MBG baru mencapai 7,7 juta orang atau hanya 9% dari target 82,9 juta pada akhir 2025 (Bijak Memantau, 2025). Distribusi SPPG masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara NTT dan Papua yang mencatat *stunting* tertinggi justru paling minim jangkauan (Institute, 2025). Fakta-fakta ini tidak muncul dalam narasi “penyesuaian”. Ia diabsenkan melalui strategi *absent presence* yang sudah diidentifikasi pada level analisis teks.

Distribusi Beban yang Asimetris

Aspek ketiga dari praktik sosial adalah bagaimana beban “efisiensi” didistribusikan. Jika pengorbanan hanya dibebankan pada masyarakat, sementara elite tetap menikmati privilese, kepercayaan publik akan terkikis. Pengurangan satu hari makan bergizi bagi anak-anak dari keluarga kuintil 1–2, yang sering menjadikan MBG sebagai satu-satunya asupan bergizi konsisten mereka—sementara pos pengeluaran nonsubstantif dalam anggaran BGN dibiarkan—adalah cermin distribusi beban yang asimetris. Ini bukan sekadar soal ketidakadilan. Dalam kerangka Fairclough, ia adalah reproduksi ketidaksetaraan sosial melalui mekanisme diskursif yang tampak netral.

Analisis Ekoteologis: Evaluasi melalui Empat Kriteria

Kriteria Kecukupan dan Keamanan

Ekoteologi keadilan menetapkan bahwa akses pangan bergizi bukan sekadar hak ekonomi, melainkan dimensi dari kehidupan yang dikaruniakan dan yang harus dijaga (Armansyah et al., 2025; Manusama, 2025). Melalui kriteria kecukupan, data menunjukkan bahwa akses gizi yang memadai belum terpenuhi untuk semua penerima manfaat. Pengurangan distribusi dari enam menjadi lima hari per pekan tanpa kompensasi nutrisi alternatif mengakibatkan defisit porsi yang dapat dihitung: ± 48 porsi per anak per tahun. Dari sisi efektivitas, CISDI (2024) telah menunjukkan bahwa MBG tidak menyentuh akar masalah *stunting* (Aking & Padmono, 2025).

Riset komparatif mereka terhadap Brazil dan Vietnam membuktikan bahwa penurunan *stunting* yang substansial hanya dicapai melalui pendekatan multisektoral yang mengintegrasikan gizi, kemiskinan, sanitasi, dan akses layanan kesehatan—bukan melalui program makan siang gratis semata. Dari sisi keamanan, kasus keracunan yang menembus 15.000 sepanjang 2025 (Celios, 2025) mengubah program yang dimaksudkan melindungi gizi anak justru menjadi ancaman bagi kesehatannya. Peneliti dari AIMI mencatat seorang anak PAUD yang tidak mengalami pertumbuhan tinggi badan pasca-keracunan, dan menyimpulkan “*Ini tidak mengatasi stunting, justru menjadi penyebab stunting*” (Tempo, 2025). Ini adalah pembalikan tragis dari mandat ekoteologis pemeliharaan kehidupan (מִשְׁמָר, shamar—Kejadian 2:15).

Limbah Makanan sebagai Persoalan Ekologis-Teologis

Kajian tentang hal ini, sesuai dari sumber Indonesia (2025) menemukan bahwa sisa makanan MBG mencapai 1,1–1,4 juta ton per tahun, dengan 451–603 ribu ton di antaranya adalah *edible food waste*—makanan masih layak konsumsi namun terbuang. Riset tim Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di 10 sekolah Bandung mengidentifikasi tiga

penyebab, yaitu perbedaan preferensi anak, kualitas makanan yang menurun karena penyimpanan terlalu lama, dan rantai distribusi yang terlalu panjang (Institute, 2025). Makanan yang membusuk di tempat pembuangan menghasilkan gas metana, sebuah gas rumah kaca yang 25 kali lebih kuat dari CO₂ (Barker, 2023). Sementara itu, data SIPSN KLHK (2024) menunjukkan sisa makanan sudah menyumbang 39,36% dari 35,02 juta ton sampah nasional Indonesia.

Dalam perspektif ekoteologi lintas agama, paradoks ini—makanan dibuang dalam jumlah masif sementara jutaan anak kekurangan gizi—adalah pelanggaran terhadap prinsip keugaharian yang ada di semua tradisi keagamaan besar Indonesia (Iman et al., 2025; Ngabalin, 2020). Ekoteologi tidak hanya menuntut respons reaktif terhadap kerusakan, tetapi desain proaktif yang mempertimbangkan keberlanjutan ekologis sejak tahap perencanaan—sesuatu yang absen dalam desain awal program MBG.

Negara sebagai Penatalayan yang Gagal Berperan Jujur

Ekoteologi menempatkan pemangku otoritas, termasuk negara, sebagai penatalayan (*steward*) atas sumber daya yang dipercayakan rakyat. Tanggung jawab penatalayanan ini bersifat moral, bukan hanya teknis-fiskal. Dalam ekoteologi Kristen, mandat mengusahakan dan memelihara (עָבַד dan שָׁמַר, Kejadian 2:15) mengharuskan pengelolaan yang sungguh-sungguh, bukan sekadar penampilan keseriusan melalui bahasa yang diperindah (Rerung & Ginting, 2025; Welikinsi, 2025). Dalam ekoteologi Islam, prinsip khalifah (QS. 2:30) mengharuskan transparansi dan keadilan dalam pengelolaan amanah publik. Kedua tradisi sepakat bahwa penatalayanan yang baik menuntut kejujuran tentang kegagalan, bukan eufemisme yang menyamarkannya.

Ketika kebijakan yang berdampak pada jutaan penerima manfaat dikomunikasikan melalui eufemisme yang menghapus agen, mengabsenkan penerima, dan menyembunyikan kontradiksi, negara telah gagal memenuhi standar penatalayanan ini. Anwar (2025) menegaskan bahwa ekoteologi adalah “jalan transformasi sosial”, bukan sekadar wacana teologis yang terlepas dari realitas politik. Dalam konteks MBG, transformasi yang dibutuhkan bukan hanya pada sistem distribusi dan keamanan pangan, tetapi pada cara negara mengomunikasikan kegagalan programnya, yakni dengan kejujuran, bukan dengan frasa yang mengaburkan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa frasa “penyesuaian anggaran” dalam wacana kebijakan MBG merupakan instrumen ideologis yang beroperasi melalui tujuh strategi eufemistis yang sistematis. Strategi-strategi ini berfungsi untuk menyembunyikan agen kebijakan, menghapus penerima manfaat dari narasi, dan merepresentasikan pengurangan layanan sebagai kemajuan teknis. Kontradiksi antara diksi resmi Indonesia dan diksi media internasional memberikan bukti empiris dari *contradictions within discourse* yang diidentifikasi kerangka AWK.

Pada level ideologis, analisis mengidentifikasi tiga mekanisme reproduksi ketidaksetaraan, yakni (1) fiskalisme yang dikomunikasikan sebagai efisiensi sistemik, sementara data anggaran

menunjukkan realokasi politik; (2) klaim keberhasilan program yang tidak dikonfirmasi data capaian; dan (3) distribusi beban yang asimetris antara penerima manfaat dan pos pengeluaran nonsubstantif. Ketiga mekanisme ini dioperasikan melalui homogenisasi *framing* di media nasional dan ketiadaan mekanisme deliberasi publik yang bermakna. Melalui kerangka ekoteologi keadilan sebagai alat evaluasi analitis, analisis menemukan bahwa kebijakan MBG tidak memenuhi keempat kriteria yang dapat diverifikasi empiris: kecukupan, solidaritas, partisipasi, dan keberlanjutan ekologis. Temuan ini merupakan hasil verifikasi data, bukan penilaian normatif. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi hubungan antara transparansi komunikasi kebijakan dan efektivitas implementasi program pangan di Indonesia.

Kontribusi Penulis	: Trisanti Ulfa Kurniasih bertanggung jawab atas seluruh proyek penelitian. Ia juga memimpin penulisan, manuskrip, dan berkolaborasi dengan penulis kedua. Azizatul Khairi berpartisipasi dalam pengumpulan dan melakukan proses mencocokkan kembali kebenaran informasi, data, serta berita yang dihimpun. Kedua penulis menyetujui manuskrip akhir.
Pernyataan Pendanaan	: Penelitian ini didanai oleh anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Tahun Anggaran 2026.
Konflik Kepentingan	: Kedua penulis menyatakan bahwa mereka tidak memiliki konflik kepentingan.
Persetujuan Etika	: Informasi tentang Persetujuan Etika dan Pernyataan Persetujuan yang diinformasikan diperlukan untuk semua artikel yang diterbitkan di MIMESIS sejak tahun 2026.

REFERENSI

- Aking, O., & Padmono, D. (2025). Pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu berkurangnya kesenjangan intra dan antar negara (Bappenas). In *Adapun. September*.
- Antara News. (2026). *Purbaya sebut efisiensi MBG bisa hemat Rp40 triliun per tahun*. Antara News.
- Anwar, R. (2025). *Penguatan ekoteologi transformasi sosial di tengah krisis iklim guna harmonisasi etika budaya dalam rangka ketahanan nasional*. katalog.lemhannas.go.id. https://katalog.lemhannas.go.id/index.php?p=show_detail&id=1956
- Armansyah, S. H., Jaman, U. B., SH, M. H., Abidin, S. H. Z., & Priyana, Y. (2025). *Ekologi Leuit dan Keadilan Lingkungan: Membangun Hukum dari Kearifan Lokal Sunda*. Sukabumi: PT. Arunika Aksa Karya.
- Asia, C. N. (2026). *Indonesia cuts meals programme to save US\$2.3 billion: What next?* Channel News.
- Barker, A. H. (2023). Hipotesis Barker dan Dampak Stunting Jangka Panjang. *Stunting Dan Gizi Buruk*.
- Celios, C. of E. and L. S. (2025). *Studi Evaluasi 1 Tahun Makan (Tak) Bergizi (Tak) Gratis*. Center of Economic and Law Studies (CELIOS). CELIOS. www.celios.co.id.
- CNN World. (2025). *Hundreds hit by food poisoning in Indonesia after eating free school meals*. CNN World.
- Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset. *Mycolological Research*, 94(4).
- Fairclough, N. (1992). Discourse and social change. In *(No Title)*. cir.nii.ac.jp. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1971430859837206152/holdings>

- Fairclough, N. (2005). Discourse in processes of social change: 'Transition' in Central and Eastern Europe. *BAS British and American Studies*.
<https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=172800>
- Fairclough, N., & Fairclough, I. (2018). A procedural approach to ethical critique in CDA. *Critical Discourse Studies*. <https://doi.org/10.1080/17405904.2018.1427121>
- Faturahman, A. (2026). *Efisiensi MBG: Menjaga Manfaat, Memperkuat Fiskal*. Radarkaltara.Com.
- France-Presse, A. (2026). *Indonesia trims meals programme: what next?* Agence France-Presse.
- Heinze, M. (2024). Between Self-Change and Social Change: On the Present of the 1970s Alternative Consumption Discourse. *Consumer Policy from Below: Paradoxes, Perspectives*. https://doi.org/10.1007/978-3-658-44478-5_8
- Iman, G., Imami, A., & Jayakusuma, S. (2025). Ekoteologi dalam Bingkai Pluralisme: Landasan Teologis Kolaborasi Lintas Agama untuk Menghadapi Krisis Iklim. *Kamali: Ilmu Agama*. <https://doi.org/10.64691/v0cj2322>
- Indonesia, B. (2025). *Bappenas Prepares the 2026 Government Work Plan as a Foundation for Economic Transformation Toward Golden Indonesia 2045*.
- Indonesia, T. I. (2025). *Merugikan Pelayanan Publik dan Melemahkan Demokrasi, Kebijakan Efisiensi Harus Segera Dievaluasi*.
- Institute, T. I. (2025). *Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis sebagai Strategi Penurunan Stunting di Indonesia*. [www.Theindonesianinstitute.Com](http://www.theindonesianinstitute.com).
- Ives, G., & Rana, R. (2018). *Language and power*.
- Kompas. (2026). *Media Asing Soroti Pemangkasan Anggaran MBG Indonesia di Tengah Perang Iran*. Kompas.Com.
- Lutz, W. (1989). Doublespeak: From revenue enhancement to terminal living. In *How Government, Business, Advertisers, and Others*.
- Manusama, L. (2025). *Keadilan ekologi berbasis paradigma bioregional dan transaksional bagi upaya advokasi oleh gereja protestan maluku*. repository.ukdw.ac.id. <http://repository.ukdw.ac.id/id/eprint/9969>
- Nasional, B G. (2025). *Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional Untuk Program Makan Bergizi Gratis*. In Badan Gizi Nasional.
- Nasional, Badan Gizi. (2025a). *BGN Pantau Status Gizi Penerima Program MBG Setiap Enam Bulan*. Badan Gizi Nasional.
- Nasional, Badan Gizi. (2025b). *Kreatif! Limbah MBG Disulap Jadi Inovasi Ekonomi Hijau*. Badan Gizi Nasional.
- News, A. (2026). *MBG jadi 5 hari, Pemerintah sebut penghematan capai Rp20 triliun*. Antara New.
- News, D. (2026). *Pemerintah Putuskan MBG Jadi 5 Hari Imbas Efisiensi, Negara Hemat Rp 20 T*. Detik.Com.
- Ngabalin, M. (2020). Ekoteologi: Tinjauan Teologi Terhadap Keselamatan Lingkungan Hidup. *CARAKA: Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika*. <https://ojs.sttbbc.ac.id/index.php/ibc/article/view/22>
- Post, S. C. M. (2026). *Indonesia slashes free meals budget to save US\$2.3 billion as fuel prices soar*. South China Morning Post.
- Purwaningsih, E. (2023). Kebijakan terkait krisis kesehatan: Analisa kebutuhan tenaga kesehatan selama pandemi Covid-19 di Indonesia. In *Kesehatan Indonesia: JKKI*.

- Rerung, A. E., & Ginting, E. N. (2025). Teologi Sangserekan sebagai Basis Persahabatan Universal Manusia Toraja. *Jurnal Bajidakka*.
<https://jurnal.stintim.id/index.php/bj/article/view/9>
- Sitorismi, A. A. (2025). Bahasa Slang dalam Media Sosial: Studi Kasus pada Takarir Unggahan Akun Instagram @gojekindonesia. *MIMESIS*, 6(1), 1–15.
<https://doi.org/10.12928/mms.v6i1.11979>
- Tempo. (2025). *Ratusan Siswa SMPN 8 Kupang Keracunan MBG. Simak Kasus Serupa Lainnya*. Tempo.Com.
- Times, T. S. (2026). *Indonesia eyes savings of \$3 billion from cut in free meal programme*. The Straits Times.
- Voi. (2025). *MBG Program Garbage Reaches 3,500 Tons Per Day, Minister Hanif Reminds Danger Of Pollution*. Voi.Id. <https://voi.id/en/news/524820>
- Welikinsi, W. (2025). Teologi Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal: Landasan Alkitabiah untuk Konservasi Alam. *Anoteros: Jurnal Teologi*. <https://ojs.sttpontianak.ac.id/index.php/anoteros/article/view/72>
- Wulandari, U. R., & Kumalasari, D. (2024). Implementasi Intervensi Gizi Spesifik Pada Ibu Hamil dan Bayi di Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. *Professional*.
<https://doi.org/10.54832/phj.v5i2.609>